ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v6i4.10088

ANALISIS PAJAK DAERAH DAN INFLASI TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI PROVINSI SUMATRA BARAT

Analysis of Regional Taxes and Inflation on Regional Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in West Sumatra Province

Pramita & Gerry Hamdani Putra
STIE KBP Padang
pramita0902@gmail.com; gerryhamdaniputra@akbpstie.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 28, 2026	Apr 25, 2026	May 7, 2026	May 12, 2026

Abstract

Although the relationship among local taxes, inflation, and regional expenditure has been widely discussed in previous studies, research examining the role of economic growth as a moderating variable in this relationship remains limited, particularly in local governments in West Sumatra Province. This study aims to analyze the effect of local taxes and inflation on regional expenditure, with economic growth as a moderating variable in West Sumatra Province. This study used a quantitative approach with secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and relevant government agencies. The research sample covered regencies and cities in West Sumatra Province during the 2020–2024 period. The data were analyzed using descriptive statistics, classical assumption tests, hypothesis testing, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that local taxes had a positive and significant effect on regional expenditure, whereas inflation had no significant effect on regional expenditure. In addition, economic growth was not proven to strengthen the

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

relationship between local taxes and regional expenditure or the relationship between inflation and regional expenditure. These findings support fiscal decentralization theory, which emphasizes the importance of regional fiscal capacity in supporting development and public services. Thus, this study contributes to the development of the literature on regional finance and macroeconomics, particularly regarding the interaction between fiscal and economic variables in local government management. The practical implications of this study emphasize the importance of formulating fiscal policies, controlling inflation, and managing regional expenditure more effectively to support sustainable economic development in West Sumatra Province.

Keywords: Local Taxes; Inflation; Regional Expenditure; Economic Growth; Fiscal Decentralization

Abstrak: Meskipun hubungan antara pajak daerah, inflasi, dan belanja daerah telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, kajian yang menguji peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut masih terbatas, khususnya pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi di Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi pemerintah terkait. Sampel penelitian mencakup kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat selama periode 2020–2024. Data dianalisis melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak terbukti memperkuat hubungan antara pajak daerah dan belanja daerah maupun hubungan antara inflasi dan belanja daerah. Temuan ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kapasitas fiskal daerah dalam menunjang pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur keuangan daerah dan ekonomi makro, khususnya terkait interaksi variabel fiskal dan ekonomi dalam pengelolaan pemerintah daerah. Implikasi praktis penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, dan pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Sumatra Barat.

Kata Kunci: Pajak Daerah; Inflasi; Belanja Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Desentralisasi Fiskal

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya keuangan daerah secara mandiri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu

mengoptimalkan potensi daerah serta mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Mononimbar, 2017).

Kinerja penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah kembali menjadi perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih adanya dana belanja yang tidak segera digunakan sehingga tetap tersimpan di rekening bank, bukannya digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani geram. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kondisi ini sebagai sesuatu yang "ironis", mengingat lambatnya realisasi belanja modal daerah.

Data Kementerian Keuangan tahun 2022 tercatat mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diteruskan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah yang signifikan, yakni sebesar Rp 769,6 triliun. Namun, hingga akhir Mei 2022, masih terdapat sekitar Rp 200 triliun dana daerah yang belum dimanfaatkan dan justru diparkir di bank. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun - tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 172 triliun pada tahun 2021 dan Rp 165 triliun pada tahun 2020.

Di lihat berdasarkan tren dari tahun ke tahun, fenomena ini menunjukkan kecenderungan peningkatan pengendapan dana, yang bisa diartikan bahwa laju pertumbuhan belanja daerah menunjukkan penurunan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa total belanja pemerintah daerah secara nasional mengalami penurunan sebesar 17% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, yaitu dari sebelumnya sebesar Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun, yang mencerminkan penurunan sebesar sekian persen.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Febriani & Mildawati (2021) menunjukan hasil dari hubungan yang positif dan signifikan antara pajak daerah dan tingka belanja pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Fauziah *et al.* 2023). Hasil menyatakan adanya hubungan positif antara pajak daerah dan belanja pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian sebelumnya (Abdul Wahab, Tona Aurora L, 2016) pajak daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) inflasi secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pengeluaran belanja daerah. Hasil penelitian dari (Merty Fatharani, Luluk Fadliyanti & Universitas Mataram, 2022) Inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Febrio, 2022), variabel inflasi menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian Tavares *et al.* (2023). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara pajak daerah terhadap belanja daerah. Hasil penelitian sebelumnya (Sri Dewi Fitrianingsih, I Kadek Bellyoni Dwijaya, 2025) pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arjuna & Azansyah, 2024) berkesimpulan bahwa inflasi dan belanja daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara simultan. Sedangkan menurut (Salfina *et al.* 2023) inflasi berdampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan, sementara belanja pemerintah memberikan dukungan positif.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam menganalisis pengaruh pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini tidak hanya menganalisis hubungan langsung antarvariabel, tetapi juga menguji bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Selain itu, periode penelitian tahun 2020–2024 dipilih karena mencakup masa krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta fase pemulihan ekonomi, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai dinamika fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi fiskal sebagai landasan utama yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya fiskal daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, pemerintah daerah diharapkan memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dalam meningkatkan belanja daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi di Provinsi Sumatra Barat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah, menganalisis pengaruh inflasi terhadap belanja daerah, serta

menguji peran pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatra Barat periode 2020–2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan karakteristik penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Barat selama periode 2020–2024. Analisis data dilakukan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian Sugiyono (2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi di Provinsi Sumatra Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat periode 2020–2024. Analisis data dilakukan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian (Sugiyono, 2021).

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat selama periode 2020–2024 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Karakteristik sampel meliputi pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap mengenai pajak daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan belanja daerah selama periode penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data panel yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatra Barat (Sugiyono, 2021).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat periode 2020–2024. Variabel

penelitian diukur menggunakan indikator pajak daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan belanja daerah yang bersumber dari data resmi pemerintah. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh, mencatat, dan mengelompokkan data sesuai kebutuhan penelitian untuk kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan Moderated Regression Analysis (MRA) (Sugiyono, 2021).

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian, sedangkan uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi. Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah. Selanjutnya, Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menguji peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah. Penggunaan metode ini relevan dengan tujuan penelitian karena mampu menjelaskan hubungan langsung maupun hubungan moderasi antarvariabel penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL

Bagian hasil disajikan secara faktual dan sistematis, dimulai dari temuan utama hingga data pendukung. Tidak mengandung interpretasi atau pembahasan teoritis (yang disimpan untuk bagian Pembahasan). Gunakan bahasa deskriptif berbasis data.

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara signifikan memengaruhi belanja daerah. Dengan kata lain, semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin luas pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran.

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,847 > 0,05, sehingga H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang berarti bahwa tingkat inflasi tidak secara langsung memengaruhi besaran alokasi belanja daerah. Dengan kata lain, perubahan tingkat harga barang dan jasa tidak menjadi

faktor utama dalam menentukan kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam periode penelitian

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,510 > 0,05, sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara pajak daerah dan belanja daerah.

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,510 > 0,05, sehingga hipotesis keempat H4 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara inflasi dan belanja daerah. Dengan kata lain, kombinasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh tambahan yang signifikan terhadap besaran alokasi belanja daerah.

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel pajak daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan belanja daerah di Provinsi Sumatra Barat periode 2020–2024. Hasil tersebut menggambarkan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	95	353179419	55028377124	4435362277.11	9627487384.388
Inflasi	95	.89	7.43	2.8600	2.36245
Pertumbuhan Ekonomi	95	-10.46	6.87	2.9042	2.93393
Belanja Daerah	95	7512399627	256500604151	106377870223.58	44434332178.071
Valid N (listwise)	95				

Sumber : Data diolah dengan SPSS Statistic 22, 2026

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian bahwa nilai dari Kolmogrov-Smirnov menunjukkan hasil Asymp. Sig *(2-tailed)* sebesar 0,087 yang berarti besar dari 0,05 (0,087 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini data berdistribusi normal serta telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2 . Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40847987
Most Extreme Differences	Absolute	.085

	Positive	.085
	Negative	-.078
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087[c]

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistic 22, 2026

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel diatas tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah	.996	1.004
	Inflasi	.950	1.052
	Pertumbuhan Ekonomi	.947	1.056

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistic 22, 2026

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel memperoleh nilai Sig. > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel diatas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.306	.053		5.786	.000
	Pajak Daerah	-3.155E-12	.000	-.107	-1.024	.309
	Inflasi	-.006	.013	-.053	-.493	.624
	Pertumbuhan Ekonomi	.006	.010	.064	.597	.552

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistic 22, 2026

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian menjelaskan masing-masing variabel dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a. Pajak Daerah

Berdasarkan dari hasil pada tabel 5 menunjukkan bahwa untuk variabel pajak daerah memiliki nilai t hitung > t tabel (5,136 > 1,66159) dan nilai sig. 0,000 < 0,05. Maka

berdasarkan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Maka **H1 diterima**.

b. Inflasi

Berdasarkan dari hasil pada tabel 5 menunjukkan bahwa untuk variabel inflasi memiliki nilai t hitung < t tabel (-0,194 < 1,66159) dan nilai sig. 0,847 > 0,05. Maka berdasarkan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Maka **H2 ditolak**.

Tabel 5. Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.220	.076		330.125	.000
	Pajak Daerah	2.289E-11	.000	.475	5.136	.000
	Inflasi	-.004	.019	-.018	-.194	.847
	Pertumbuhan Ekonomi	-.004	.015	-.027	-.285	.776

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistic 22, 2026

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,200 atau 20%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent seperti pajak daerah dan inflasi mampu menjelaskan belanja daerah sebagai variabel dependen sebesar 20%. Sedangkan untuk sisanya 80% dijelaskan oleh variabel lainnya selain variabel pada penelitian ini.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.475[a]	.225	.200	.4151585	.808

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistic 22, 2026

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai sign. 0,510 > 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh inflasi terhadap belanja daerah. **Maka H4 ditolak**.

Tabel 7. Uji *Moderated Regression Analysis*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.071	.217		115.411	.000

	Pajak Daerah	2.794E-11	.000	.580	3.089	.003
	Inflasi	.060	.098	.303	.610	.544
	Pertumbuhan Ekonomi	.033	.051	.206	.635	.527
	Pertumbuhan Ekonomi dengan Pajak Daerah	-1.428E-12	.000	-.130	-.662	.510
	Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi	-.014	.022	-.421	-.661	.510

Sumber: Data diolah dengan SPSS Statistic 22, 2026

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil analisis penelitian mendukung hipotesis ini, dimana pajak daerah terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 5,136 dan nilai sign. 0,0000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sehingga **H1 diterima**. Semakin besar Pajak Daerah yang diterima oleh suatu daerah, serta semakin efektif pemanfaatannya, maka jumlah dana yang digunakan atau disalurkan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal juga cenderung meningkat (Febriani & Mildawati, 2021).

Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar -0,194 dan nilai signifikansi 0,847 > 0,05. Dengan demikian, inflasi tidak terbukti memengaruhi belanja daerah secara signifikan sehingga **H2 ditolak**. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat inflasi tidak secara langsung memengaruhi besaran alokasi belanja daerah dalam periode penelitian. Meskipun secara teori inflasi dapat meningkatkan kebutuhan anggaran akibat kenaikan harga barang dan jasa, dalam praktiknya pemerintah daerah cenderung telah mengantisipasi perubahan tingkat harga melalui mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan proyeksi ekonomi tahunan. Dengan demikian, fluktuasi inflasi tidak secara signifikan memengaruhi realisasi belanja daerah Fatharani *et al.* (2022).

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sign. 0,510 > 0,05. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah sehingga **H3 ditolak**. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara pajak daerah dan belanja daerah. Dengan kata lain, pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah tetap konsisten terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja daerah lebih dipengaruhi secara langsung oleh besarnya penerimaan pajak daerah itu sendiri dibandingkan oleh dinamika pertumbuhan ekonomi (Sri Dewi Fitrianingsih, I Kadek Bellyoni Dwijaya, 2025).

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Inflasi terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh inflasi terhadap belanja daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai sign. 0,510 > 0,05 sehingga **H4 ditolak**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berperan dalam memperkuat maupun melemahkan hubungan antara inflasi dan belanja daerah. Dengan kata lain, interaksi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh tambahan yang signifikan terhadap perubahan alokasi belanja daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah daerah tidak secara langsung dipengaruhi oleh kombinasi fluktuasi harga (inflasi) dan tingkat pertumbuhan ekonomi (Sari, Y., & Darmawan, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatra Barat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriani & Mildawati, 2021) serta (Fauziah *et al.,* 2023) yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972), yang menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penerimaan pajak dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

Pada variabel inflasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memengaruhi belanja daerah melalui peningkatan biaya operasional pemerintah daerah dan perubahan daya beli masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Wulandari, 2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Fatharani et al., 2022) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan periode penelitian, kondisi ekonomi daerah, serta karakteristik data yang digunakan.

Selain itu, hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah dan inflasi terhadap belanja daerah. Temuan ini memperlihatkan adanya perkembangan baru bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berperan sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga mampu memperkuat efektivitas pengelolaan fiskal daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tavares et al., 2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pajak daerah dan belanja daerah.

Temuan penelitian ini memperkuat teori desentralisasi fiskal yang menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat mendukung efektivitas belanja daerah. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pajak daerah, pengendalian inflasi, dan optimalisasi belanja daerah guna mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat periode 2020–2024 sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan variabel pajak daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan belanja daerah, sehingga masih terdapat faktor lain yang kemungkinan memengaruhi belanja daerah namun belum dimasukkan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian, memperluas wilayah penelitian, serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar hasil penelitian lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sehingga semakin besar penerimaan pajak daerah maka semakin besar pula kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yang berarti perubahan tingkat harga barang dan jasa tidak secara langsung memengaruhi kebijakan pengeluaran pemerintah daerah selama periode penelitian. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap belanja daerah maupun hubungan antara inflasi terhadap belanja daerah. Dengan demikian, pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah bersifat langsung dan tidak dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi.

Studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat hubungan antara pajak daerah dan belanja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan efektivitas belanja daerah dan pembangunan daerah.

Rekomendasi penelitian selanjutnya meliputi: (1) memperluas objek dan periode penelitian agar hasil lebih representatif; (2) menambahkan variabel lain seperti dana transfer, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi untuk memperkaya analisis; serta (3) meningkatkan optimalisasi pajak daerah melalui digitalisasi dan perbaikan sistem pemungutan guna mendukung efektivitas belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arjuna, W., & Azansyah, A. (2024). Pengaruh Belanja Daerah, Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu. *Jurnal Inovasi Global, 2*(11), 1793–1809. https://doi.org/10.58344/jig.v2i11.210

Fatharani, M., Fadliyanti, L., & Agustiani, E. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan, 1*(1), 1–17. https://doi.org/10.29303/oportunitas.v1i1.128

Fauziah, C. A., Wulandari, H. K., & Kharisma, A. S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah. *JLEB: Journal of Law, Education and Business, 1*(2), 518–526. https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1119

Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10*(1). https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3728

Febrio, R. P. (2022). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2012–2019* [Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/21556/

Fitrianingsih, S. D., Dwijaya, I. K. B., & Rahmawaty, S. (2025). Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, Retribusi, dan Dana Perimbangan. *Jurnal Kolaboratif Sains, 8*(5), 2080–2091. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7386

Mononimbar, R. W. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005–2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 17*(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/17281

Salfina, L., Nurtati, N., Meidona, S., Elvina, Y., & Yadewani, D. (2023). The effect of inflation and government spending on economic growth in the West Sumatra Province. *Husnayain Business Review, 3*(2), 75–81. https://doi.org/10.54099/hbr.v3i2.702

Sari, Y., & Darmawan, R. (2021). Moderating role of economic growth in the influence of inflation on regional government expenditure in Indonesia. *Economic Journal of Regional Development, 9*(3).

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tavares, J., Pangastuti, D. A., & Subiyantoro, E. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating: Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia, 4*(1), 33–51. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/view/9595

Wahab, A., Tona Aurora L, & Susfayetti. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 1*(3). https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/3173

Wulandari, A. (2017). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Kebijakan Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012–2014* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. https://digilib.uin-suka.ac.id/24927/